

BAB II

MISI DEMOKRASI DAN KEPENTINGAN AMERIKA SERIKAT DI MESIR

Middle East & North Africa (MENA) merupakan kawasan yang vital terhadap kepentingan Amerika Serikat, hal ini berkaitan dengan isu-isu seperti sumber daya minyak, perdamaian, maupun isu yang berkaitan pasca berdirinya Israel dan perang Arab-Israel (Saunders, 1978). Perdamaian dan keamanan pasca perang Arab-Israel tentunya dibutuhkan Amerika Serikat dalam mengimplentasikan ketertarikannya terhadap sumber daya minyak negara-negara MENA, maka pada 1970 hingga 1990-an Amerika Serikat berangsur-angsur melakukan upaya terhadap negara-negara Arab yaitu penggunaan militer, kerja sama strategis, dan reformasi ekonomi hingga pada reformasi politik melalui upaya demokratisasi yang dalam tahun 1991-2001 Amerika Serikat telah mengeluarkan dana 250 juta dolar untuk program demokrasi di Timur Tengah khususnya Mesir dan Palestina (Durocher, 2004).

Sebelum aktivitas Amerika Serikat di Timur Tengah khususnya Mesir, Amerika Serikat memiliki keeratan dengan konsep demokrasi dan prakteknya sebagai objektif politik luar negerinya. Misalnya pada agenda ‘World Safe for Democracy’ oleh Woodrow Wilson yang merupakan presiden Amerika Serikat ke-28. Pada setelahnya, kebijakan strategis sebagai upaya mendukung gerakan demokrasi berkembang melalui Atlantic Charter, Marshall Plan, Berlin Airlift, serta Foreign Assistance Act pada 1961 (Latif & Abbas, 2011).

2.1. Fokus Awal Amerika Serikat Terhadap Minyak dan Keamanan Kawasan Timur Tengah dan Hubungannya Dengan Mesir

Timur Tengah merupakan kawasan strategis yang penting sebagai poros jalur dunia internasional yang menghubungkan benua Eropa, Asia, dan Afrika. Dalam hal ini pula Timur Tengah memiliki potensi besar dalam sumber daya alamnya yaitu 65% cadangan minyak dunia (ICMES, 2016). Sampai dengan masa tahun 1970-an, ketertarikan Amerika Serikat pada Timur Tengah ialah akses terhadap minyak yang melimpah. Hal tersebut diawali dari pengembangan kawasan negara penghasil minyak oleh Amerika Serikat dari temuan sumber minyak di Arab Saudi, Bahrain, dan Kuwait pada tahun 1932-1934. Pada 29 Mei 1933, perusahaan asal California bernama Standard Oil Company memperoleh hak atas eksplorasi minyak yang mencakup daerah bagian timur Arab Saudi selama 60 tahun (Jatmika, 2014). Sebagai tindak lanjut atas hak eksplorasi tersebut, didirikan perusahaan penambangan minyak yaitu Californian Arabian Standard Oil yang selanjutnya pada tahun 1934 perusahaan minyak Texas bergabung dan berubah nama menjadi Arabian Oil Company (Aramco). Dalam langkah awal proses pengembangan upaya eksplorasi perusahaan tersebut, perusahaan diwajibkan memberikan pinjaman sebesar 30 ribu poundsterling berupa emas kepada Arab Saudi yang sedang terpuruk akibat depresi dunia yang saat itu sedang melanda. Perusahaan tersebut menanggung resiko sendiri karena pemerintah Amerika Serikat pada waktu itu belum memberikan dukungan atas operasi perusahaan tersebut dalam eksplorasi minyak Arab Saudi (Jatmika, 2014).

Dalam prosesnya, Amerika Serikat mulai memandang penting Timur Tengah dan eksplorasi minyaknya. Pemerintah Amerika Serikat mulai memberikan perhatiannya terhadap minyak Timur Tengah melalui presiden Roosevelt yang mulai mengemas kegiatan intervensi sebagai bentuk politik luar negerinya. Roosevelt memiliki pandangan bahwa kawasan Timur Tengah merupakan kawasan penghasil minyak raksasa di dunia, dengan demikian langkah-langkah dilakukan untuk memperkokoh hegemoninya di kawasan tersebut (Jatmika, 2014). Roosevelt mengadakan negosiasi pada tahun 1944 bersama duta besar Inggris agar saling menggunakan minyak Timur Tengah. Roosevelt menyatakan, “minyak kawasan Persia adalah milik kalian. Kita bagi bersama minyak Irak dan Kuwait. Sedangkan Arab Saudi, maka minyaknya milik kita bersama” (Jatmika, 2014). Pada 8 Agustus 1944, perjanjian Inggris-Amerika Serikat ditandatangani yang isinya untuk saling memanfaatkan hasil minyak bumi Timur Tengah. Selanjutnya setahun kemudian, Amerika Serikat memulai membangun pangkalan militernya di Dhahran, Arab Saudi (Jatmika, 2014).

Dalam upaya memperoleh akses minyak melimpah, Amerika Serikat memiliki pandangan yaitu diperlukan suatu tatanan keamanan dan politik yang stabil di Timur Tengah, maka upaya yang dapat dilakukan adalah upaya penggunaan kekuatan militer dan upaya kerja sama strategis dengan negara-negara Timur Tengah (Durocher, 2004). Pada tahun-tahun 1980-an, kestabilan Timur Tengah dihadapkan pada kondisi perselisihan antara negara-negara Arab dan Israel pasca perang Arab-Israel selama puluhan tahun. Israel sendiri dihadapkan sebagai peran utama dalam mewujudkan harapan kestabilan Timur

Tengah oleh Amerika Serikat dengan melalui kekuatan militer Israel dalam menjamin keamanan dan dibarengi dengan perdamaian Israel dengan negara-negara regionalnya.

Kepentingan awal Amerika Serikat di Timur Tengah menjadi penting sebagai awal kepentingan lain yang muncul seiring terjadinya berbagai peristiwa yang membutuhkan keterlibatan Timur Tengah misalnya kondisi pasca Perang Dunia II yang membutuhkan banyak energi untuk berbagai sektor. Riwayat kepentingan minyak Amerika Serikat dapat dilihat pada berikut:

Tabel 2.1. Riwayat Kepentingan Minyak Amerika Serikat

No.	Tahun	Peristiwa	Keterangan
1.	1945	Berakhirnya Perang Dunia Ke-2	Perang dunia kedua menghasilkan Amerika Serikat menjadi negara adidaya dan ekonomi besar. Maka demikian kebutuhan akan energi untuk industri semakin meningkat drastis contohnya adalah sektor otomotif
2.	1948	Marshal Plan	Dalam Marshal Plan, Amerika Serikat turut memberikan bantuan sebesar 11 miliar dolar dalam bentuk minyak kepada negara Eropa pasca perang dunia kedua (10% dari total bantuan). Negara Eropa juga turut bergantung pada minyak seiring dengan transisi kebutuhan industri dari batu bara menjadi minyak mentah. Pada tahun 1945, Amerika Serikat adalah negara eksportir minyak, namun seiring pada tahun 1950, Amerika Serikat mengimpor satu juta barel minyak perhari dan meningkat sampai enam juta barel perhari dalam dua dekade

No.	Tahun	Peristiwa	Keterangan
3.	1954	Kongsi Minyak Iran-Amerika Serikat	Setelah penjatuhan Perdana Menteri Iran Mohammed Mossadeq, yang pada dua tahun sebelumnya menasionalisasi industri minyak Iran. Dengan naiknya pemerintahan Shah, pada 1954 terjadi kesepakatan pengolahan minyak Iran dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Amerika Serikat
4.	1956-57	Krisis Kanal Suez	Pada 1956, Kanal Suez dinasionalisasi oleh Mesir yang sebelumnya dikontrol oleh Inggris dan Prancis. Penutupan kanal mengancam lalu lintas perdagangan yang setengahnya adalah pengapalan minyak sebesar 800 ribu barel perhari menuju Eropa. Krisis tersebut juga memicu tensi Perang Dingin. Amerika Serikat memandang Timur Tengah akan menjadi hadiah besar bagi komunisme maka demikian Presiden AS Dwight D. Eisenhower meminta kongres untuk memberikan asistensi dukungan kepada negara di kawasan tersebut dalam sektor ekonomi dan militer
5.	1967	Embargo Minyak Arab	6 Juni 1967, Perang 6 Hari terjadi dan pada 7 Juni, para pemimpin Arab menyatakan embargo minyak kepada negara sekutu Israel. Pengiriman minyak ke Inggris dan Amerika Serikat dihentikan. Produksi dalam negeri Amerika Serikat meningkat 1 juta barel perhari untuk memenuhi kebutuhan atas terhentinya pasokan minyak dari Timur Tengah. Embargo dihentikan pada September
6.	1973	Penghentian Kebijakan Kuota Impor Minyak AS	Terjadi kelangkaan minyak dalam negeri Amerika Serikat, maka Presiden Richard Nixon mengakhiri kebijakan pembatasan kuota impor minyak yang dibuat pada 1959. Seiring berakhirnya kebijakan tersebut, impor minyak Amerika Serikat meningkat menjadi 30% pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan meningkat menjadi hampir 50% dalam empat tahun

No.	Tahun	Peristiwa	Keterangan
7.	1973	Krisis Minyak Arab	Perang Yom Kippur pecah pada 6 Oktober 1973 yang memicu penghentian pengiriman minyak oleh Arab sebagai bentuk respon atas bantuan 2,2 miliar dolar Amerika Serikat kepada Israel. Suplai minyak dunia turun 14% dan negara konsumen mengalami kepanikan. Harga minyak di Amerika Serikat meningkat 40% dan menciptakan kelangkaan pasokan minyak
8.	1974	Berakhirnya Embargo Minyak Arab	Diplomasi dilakukan Amerika Serikat dan kementerian perminyakan Arab setuju untuk penghentian embargo minyak sekaligus pencapaian kepentingan kedua pihak seperti gencatan senjata dan penarikan pasukan Israel di wilayah pendudukan

Sumber: Council of Foreign Relations, *Timeline: Oil Dependence and U.S. Foreign Policy* (CFR.org)

Melalui *timeline* kepentingan Amerika Serikat terkait minyak di Timur Tengah, gejolak tatanan keamanan terjadi utamanya pada tahun 1956 yaitu krisis kanal Suez, tahun 1967 dimana Perang 6 Hari meletus dan tahun 1973 ketika Perang Yom Kippur terjadi. Tiga gejolak tersebut melibatkan Mesir dan Israel sebagai pihak utama.

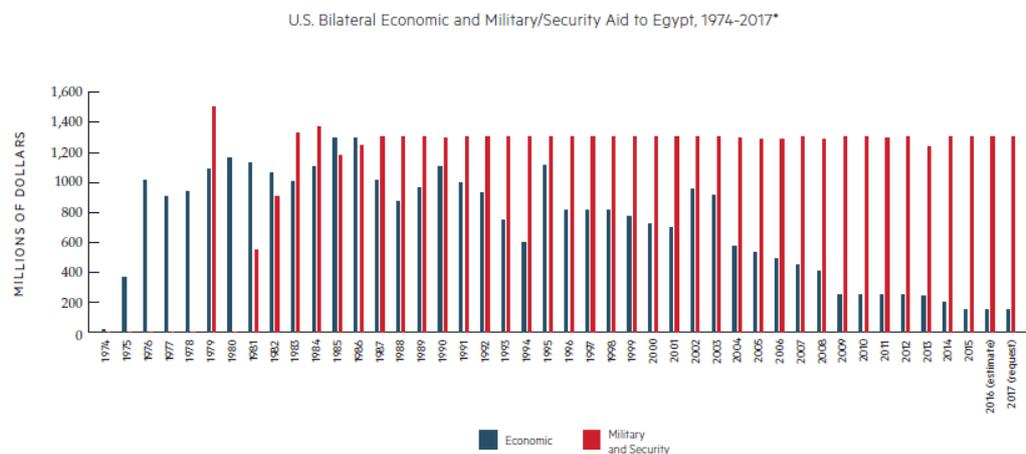
Melalui keberhasilan Perjanjian Mesir-Israel pada tahun 1974, Presiden Amerika Serikat berkeinginan agar tercipta perdamaian antara Mesir-Israel dan pengalihan arah Mesir kepada Uni Soviet, maka demikian Amerika Serikat menawarkan bantuan pangan dan dana rehabilitasi infrastruktur pasca perang dengan Israel kepada Mesir. Beberapa tahun setelahnya Mesir memutuskan hubungan dengan Moskow (Hawthorne, 2016).

Pada 12 Juni 1978, Asisten Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk Timur Tengah, Harold H. Saunders menyatakan bahwa kerjasama negara-negara Timur Tengah dengan Israel dapat diwujudkan didalam konteks perdamaian yang diawali dengan kunjungan Presiden Sadat ke Yerusalem sejak perang 1973 yang menjadi faktor psikologis bagi negara-negara Arab lainnya (Saunders, 1978). Dalam pernyataan itu pula, Amerika Serikat menyatakan beberapa poin utama seperti upaya resolusi Palestina yang mengubah arah topik masalah dari permasalahan pengungsi menjadi upaya pemenuhan hak-hak Palestina, kepentingan ekonomi utamanya terkait interdependensi minyak antara Amerika Serikat dan negara-negara Arab, peran Amerika Serikat sebagai negara modern akan menguntungkan bagi negara Arab dalam konteks pendidikan maupun adopsi teknologi, serta premis-premis kebijakan luar negeri Amerika Serikat seiring dengan kepentingan bagi kedua pihak.

Keberhasilan diplomasi Amerika Serikat dan tawaran bantuan jangka panjang menciptakan langkah besar Mesir yang menandatangani Perjanjian Asistensi kedua negara. Perjanjian tersebut mengembangkan kehadiran United States Agency for International Development (USAID) dan meningkatnya bantuan kepada Mesir diikuti dengan Pakta Damai pada 1979. Seiring terciptanya perjanjian damai, bantuan ekonomi Amerika Serikat pada Mesir sebesar 1 miliar dolar meningkat menjadi 840 juta dolar bantuan ekonomi dan 1,3 miliar dolar bantuan militer pertahun dalam beberapa dekade (Hawthorne, 2016). Bantuan ini` dipandang sebagai upaya kuat Amerika Serikat dalam menjaga stabilitas dan perdamaian Timur Tengah sebagaimana dikatakan dalam studi U.S. Government

Accountability Office yang menyatakan bantuan ‘hanya merupakan simbol politik upaya stabilitas Timur Tengah daripada fokus kemampuan Mesir dalam menyerap bantuan dan menggunakannya secara efektif’ (U.S. Government Accountability Office, 1982).

Gambar 2.1. Besaran Dana Bantuan Ekonomi dan Militer Amerika Serikat Terhadap Mesir



Sumber: Amy Hawthorn (2016), *Rethinking U.S. Economic Aid To Egypt*

Dana bantuan militer mulai diberikan kepada Mesir pada tahun 1978 sebagaimana besaran dana bantuan mengalami kestabilan mulai tahun 1984 dan stabil hingga tahun 2017 sesuai data tersebut. Sedangkan besaran bantuan dana ekonomi menunjukkan tren penurunan.

Program bantuan Amerika Serikat kepada Mesir yang diberikan adalah berbentuk dana hibah dan dana pinjaman untuk perkembangan Mesir. Pada 1984 semua bantuan diberikan dalam bentuk dana hibah yang secara umum digunakan

dalam tiga kategori yaitu dana untuk mendukung pemerintahan Mesir, proyek infrastruktur, dan berbagai jenis proyek pengembangan lain yang berjangka panjang. Dalam perkembangannya, Amerika Serikat menambah beberapa objek atau tujuan rasional ke dalam program bantuan tersebut. Misalnya dalam hal reformasi kebijakan ekonomi pasar bebas Mesir yang dirasa lambat pada pemerintahan Mubarak, pemerintahan Amerika Serikat dibawah Presiden Reagan mengembangkan tujuan objektif tersebut misalnya pada pengembangan sektor privat. Hal yang sama dilakukan oleh pemerintahan George H.W. Bush dan Clinton. Namun pada pemerintahan Clinton, terdapat penambahan tujuan objektif dari bantuan terhadap Mesir yaitu pengembangan institusi demokratis. Clinton berpandangan bahwa ‘pemerintahan yang baik’ akan meningkatkan tujuan ekonomi yang terorientasi pada pasar yang ingin dicapai Amerika Serikat pada Mesir.

Melalui pemerintahan Clinton yang memandang bahwa ‘pemerintahan yang baik’ merupakan prioritas utama pada masa perang dingin, dana hibah terhadap Mesir semakin dikembangkan pada berbagai sektor demokratis. Pada masa inilah dana hibah kepada Mesir mulai semakin besar terhadap sektor-sektor demokratis dibanding dengan masa sebelumnya yang fokus pada sektor pemulihan dan pembangunan infrastruktur pasca perang dengan Israel. Pemerintahan Clinton mengalirkan dananya kepada peningkatan efisiensi pada badan yudisial dan parlemen serta kepada berbagai organisasi masyarakat sipil. Berlanjut pada masa presiden George W. Bush, perkembangan fokus dana hibah terhadap Mesir semakin fokus pada program-program demokratisasi karena dipengaruhi oleh

peristiwa 11 September 2001 (9/11). Melalui peristiwa 9/11, Bush memandang bahwa promosi demokrasi menjadi hal fundamental dalam fokus kebijakan luar negerinya dan pada kebijakan keamanannya khususnya di Timur Tengah (Latif & Abbas, 2011). Pemerintahan Bush juga menganggap bahwa situasi ekonomi yang stagnan di negara Arab khususnya pada pemerintahan Mubarak yang saat itu dianggap berpengaruh pada meningkatnya aktivitas Al-Qaeda serta meningkatnya sentimen anti-Amerika Serikat. Dengan adanya situasi tersebut, pemerintahan Bush merumuskan kebijakan yang disebut Freedom Agenda (Hawthorne, 2016).

Dalam program Freedom Agenda pada tahun 2005, USAID mulai mendukung langsung pada berbagai organisasi sipil Mesir yang berfokus pada HAM, pemilihan umum, partai, keagamaan, hukum, kesatuan perdagangan, serta berbagai hal yang berkaitan dengan politik yang pada sebelumnya dianggap sensitif oleh pemerintahan Mubarak. Upaya dukungan tersebut umumnya dilakukan bersamaan dengan koordinasi aktivitas diplomatik, ekonomi, dan militer (Latif & Abbas, 2011). Pada 2007, pemerintahan Bush memperbesar bantuan dalam misi demokrasinya kepada Mesir sebesar 50 juta dolar yang saat itu merupakan satu perempat dari total dana bantuan dalam satu tahun (Hawthorne, 2016).

Melalui poin-poin sebelumnya, secara umum Amerika Serikat memiliki kepentingan-kepentingan dalam bidang politik, ekonomi, dan keamanan di Timur Tengah yang memiliki nilai strategis. Mesir menjadi salah satu wilayah penting untuk tujuan yang strategis bagi Amerika Serikat karena Mesir berada dalam posisi garis lintang lalu lintas dunia. Bagi Amerika Serikat, Mesir menjadi lokasi

transit bagi penerbangan dan pengisian bahan bakar pesawat tempur Amerika Serikat menuju wilayah Timur Tengah. Hal lainnya adalah Terusan Suez yang merupakan jalur transit utama bagi ekonomi dunia dan khususnya transit kapal angkatan laut Amerika Serikat. *U.S. Government Accountability* menyatakan pada tahun 2006, bahwa antara tahun 2001 sampai 2005, pemerintah Mesir memberi izin terhadap 36.553 penerbangan pesawat militer dan 861 transit kapal angkatan laut Amerika Serikat melalui Terusan Suez (*U.S. Government Accountability, 2006*).

Dalam isu Israel, Mesir juga merupakan aktor penting dan strategis, khususnya terkait perbatasan negaranya dengan Israel dan dalam hal politik menjadi aktor penting dalam upaya perdamaian Israel dan Palestina (*Aftandilian, 2013*).

Fokus kebijakan luar negeri Amerika Serikat di Timur Tengah umumnya adalah terkait minyak, peristiwa 9/11, dan kepentingan Israel. Namun Amerika Serikat melakukan perubahan fokus kebijakannya di Timur Tengah pasca terjadinya Arab Spring yang melanda kawasan tersebut. Hal ini disebabkan peristiwa Arab Spring yang dapat berdampak pada kepentingan Amerika Serikat karena Arab Spring berefek beruntun pada negara-negara Timur Tengah dalam waktu kurang lebih 2 tahun (*Darwis, 2015*). Oleh James N. Mattis yang merupakan komandan pusat angkatan bersenjata Amerika Serikat menyatakan terdapat empat hal yang menjadi fokus Amerika Serikat di Timur Tengah pasca Arab Spring, hal-hal tersebut adalah 1) keamanan nasional Amerika Serikat beserta warga negaranya, 2) stabilitas regional, 3) dukungan/promosi atas efektivitas dan

legitimasi pemerintahan, HAM, penegakan hukum, dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, 4) kebebasan atas kegiatan hubungan dagang, baik melalui jalur laut, jalur darat, maupun udara dalam lingkup regional (Katulis, 2012).

Munculnya gelombang Arab Spring, pemerintahan Presiden Barack Obama memiliki pandangan yang bersifat pragmatis dalam menyikapinya. Dalam hal ini AS secara mayoritas dalam berbagai hal mendukung transisi demokratis Mesir, Tunisia maupun Libya (Alessandri, Hassan, & Reinert, 2015).

Sikap AS mendukung transisi demokratis Mesir (Presiden Morsi) nantinya juga berefek pada upaya kerja samanya yang dikatakan pemerintah AS dengan pemerintahan Islam (konteks Muslim Brotherhood) dengan penilaiannya melalui aksi/tindakan, bukan kata-kata (Sharp, Egypt: Background and U.S. Relations, 2014).

2.2. Terpilihnya Mohamed Morsi Secara Demokratis Sebagai Presiden Mesir

Hubungan Morsi dan Muslim Brotherhood (MB) sejak awal memiliki kaitan yang erat sebelum masa kekuasaan Morsi, hal ini ditunjukkan dalam proses pembentukan pondasi partai dengan pemilihan Morsi sebagai presiden *Freedom and Justice Party* (FJP), Essam al-‘Aryan sebagai wakil presiden dan juru bicara, dan Saad El-Katatni sebagai sekretaris jenderal pada 30 April 2011. Muslim Brotherhood sendiri adalah organisasi transnasional Islam Sunni yang dibentuk di Mesir oleh para cendekiawan Islam dan Hassan al-Banna pada 1928. Pada perkembangannya, Muslim Brotherhood terlibat berbagai sektor pergerakan

seperti gerakan pan-Islamis, keagamaan, maupun gerakan sosial di Mesir dan pasca perang Arab – Israel dan bertujuan untuk menegakkan negara berdasar syariat Islam. Muslim Brotherhood mampu menggantikan ideologi sekuler nasionalis Arab di Mesir pasca kekalahan negara-negara Arab dalam perang dengan Israel. Pasca revolusi Mesir pada Arab Spring, Muslim Brotherhood memperoleh legalitas pada 2011 dan memenangkan beberapa pemilihan di Mesir. Dalam proses ini pula pondasi dari Muslim Brotherhood sebagai organisasi sosial berubah haluan menjadi organisasi politik. Visi-visi yang dibangun juga dijelaskan bagaimana Muslim Brotherhood menarget tujuan yang akan dicapai, salah satunya adalah membangun kehidupan rakyat sipil dengan menggunakan referensi Islam, hal ini dapat diwujudkan melalui Konstitusi Mesir yang berlandaskan Islam sebagai agama nasional dan prinsip-prinsip Sharia sebagai sumber legislasi (Reda, 2014).

Pada 2011, Hosni Mubarak yang merupakan presiden keempat Mesir turun dari jabatannya terkait tuduhan pemerintahan korup dan penyalahgunaan kekuasaan, juga terkait dengan tuduhan pembunuhan demonstran (New York Times, 2013). Hal ini yang melancarkan jalan Muslim Brotherhood untuk terlibat secara terbuka dalam politik Mesir dan menghasilkan pembentukan *Freedom and Justice Party* (Britannica, 2019). Pada April 2012, Morsi terpilih menjadi kandidat presiden setelah pimpinan Deputi Pergerakan Umum Khairat al-Shater gagal dalam pencalonannya. Dalam masa kampanyenya, Morsi mempresentasikan dirinya sebagai kubu yang melawan sisa-sisa pendukung Mubarak (BBC, 2019).

Calon presiden yang diusung Muslim Brotherhood melalui partai *Freedom and Justice* dinyatakan menang pemilihan presiden sebesar 51,73%, 13.230.131 suara melawan mantan PM Ahmed Shafiq yang memperoleh 48,27%, 12.347.380 suara (BBC, 2012). Pasca kemenangan tersebut, Morsi dinyatakan segera keluar dari pimpinan partai *Freedom and Justice* (FJP) sesuai yang dijanjikan sebelumnya (Fathi, 2012).

Pasca kemenangan Muslim Brotherhood dan *Freedom and Justice Party* (FJP) melalui Morsi, banyak pihak khawatir akan kepemimpinan Morsi melalui *Freedom and Justice Party* (FJP) jika menjadi mayoritas, utamanya para sekuler, nonmuslim, dan liberal. Hal ini menciptakan perdebatan terkait politik dan agama di Mesir dan Morsi dalam wawancara pada saluran Dream TV pada putaran awal pemilihan presiden menanggapi hal tersebut dengan menyatakan “Mesir sebagai negara dengan konstitusi nasional yang demokratis. Prinsip-prinsip Sharia adalah sumber utama dalam legislasi. Nonmuslim yang terikat dengan ketuhanan memiliki hak untuk diatur dan dihakimi menurut hukum kepercayaan mereka didalam urusan pribadi” (Ozdemir, 2013). Hal ini menunjukkan kesamaan visi yang dibangun oleh Muslim Brotherhood dan *Freedom and Justice Party* (FJP) melalui Morsi dan Morsi berupaya menyatakan akan sifat inklusif dari pemerintahannya terhadap para nonmuslim seperti Koptik atau Kristen.

Kesamaan nilai antara Muslim Brotherhood dan Morsi sejak awal perpolitikannya di Mesir menciptakan akomodasi yang diberikan Morsi dalam kekuasaannya untuk Muslim Brotherhood maupun *Freedom and Justice Party* (FJP). Misalnya dalam menyongsong pembentukan Konstitusi Mesir yang baru,

sebuah komite dibentuk dengan formasi 39 anggota partai dan 61 independen dimana *Freedom and Justice Party* (FJP) memiliki 16 kursi dan al-Nour 7 kursi (Ozdemir, 2013). Hal ini menciptakan protes oleh oposisi dan ketidakjelasan akan proses pembentukan konstitusi yang baru. Namun demikian dalam prosesnya, pengusulan draft konstitusi yang diajukan dan ditunjukkan kepada pers menciptakan perdebatan dan kontroversi akibat akomodasi nilai-nilai Islam yang kuat didalamnya. Disiapkan secara cepat oleh pemerintahan Morsi, Konstitusi 2012 utamanya dibuat oleh aktor politik Islamis, dimana menonjolkan orientasi Islam sebagai agama untuk diabadikan dalam sistem legal negara (Reda, 2014).

Konstitusi tahun 2012 pada masa Morsi bertolakbelakang dengan konstitusi tahun 1971 dan mirip dengan konstitusi 2014 dalam hal terkait demokrasi yang juga berkaitan dengan bagaimana upaya menonjolkan sistem politik Mesir. Hal ini berkaitan dengan pernyataan tujuan bagaimana gambaran dari negara baru Mesir oleh Morsi. Namun dalam periode yang sama, konstitusi 2012 mencoba menciptakan peran agama yang semakin kuat, utamanya Islam, Kristen, dan Yahudi dalam berbagai aspek hukum Mesir (Ozdemir, 2013).

Pengusul dari konstitusi 2012 secara mayoritas merupakan Muslim Brotherhood dan petinggi Islamis, banyak dari mereka juga memuji akan upaya penguatan Islam dan hukum Islam didalam dokumen sentral negara namun secara bersamaan menyatakan konstitusi tersebut bermaksud untuk membawa kestabilan bagi Mesir (Ozdemir, 2013).

2.3. Hubungan Amerika Serikat Dengan Pemerintahan Terpilih Morsi

Satu hari pasca pengumuman kemenangan Morsi sebagai presiden Mesir, Amerika Serikat melalui Presiden Barack Obama menyatakan ucapan selamat terhadap Morsi. Obama menyatakan, “kita berminat dalam bekerja sama dengan presiden terpilih Morsi, dengan dasar untuk saling menghormati, memajukan kepentingan bersama antara Mesir-Amerika Serikat” (Paulson, 2012).

Presiden Morsi dalam pidatonya pada sidang Majelis Umum PBB pada tanggal 26 September 2012 mengatakan dirinya tak akan mengubah secara drastis politik luar negeri Mesir yang khususnya terhadap Amerika Serikat, misalnya dalam hal ini adalah perjanjian Camp David antara Mesir-Israel yang diprakarsai oleh Amerika Serikat. Selain itu juga Morsi menyatakan akan memilih demokrasi sistem pemerintahan Mesir serta pinjaman yang dilakukan Morsi pada IMF (Paulson, 2012).

Amerika Serikat berupaya menyeimbangkan pemerintahan Mesir dengan cara melakukan upaya diplomasi oleh Barack Obama dengan mengutus Hillary Clinton pasca Morsi dilantik sebagai presiden. Hal ini dilakukan sebagaimana Obama ingin agar Morsi dapat bersikap kooperatif dalam menjaga berbagai kepentingannya di wilayah Mesir dan tidak ingin Mesir jatuh ke kelompok-kelompok tertentu. Bersamaan dalam kunjungan tersebut, Amerika Serikat menawarkan bantuan sebagai upaya restorasi ekonomi Mesir yang sedang dalam masa ketidakpastian. Sebulan pasca kedatangan Hillary Clinton, Leon Panetta yang merupakan *U.S. Defense Secretary* juga melakukan kunjungan ke Mesir dan bertemu Morsi serta Menteri Pertahanan Mesir, Tantawi. Dalam kunjungan

tersebut, Panetta mengisyaratkan agar Morsi tetap bertindak independen dari pengaruh Ikhwanul Muslimin. Isyarat ini dilakukan Amerika Serikat sebagai langkah untuk menyingkirkan Morsi dari pengaruh Ikhwanul Muslimin (Aftandilian, 2013).

Sisi lain dari hubungan Mesir dan AS, beberapa kebijakan luar negeri Morsi dianggap mengkhawatirkan posisi hubungan AS-Mesir. Upaya pendekatan Morsi ke China misalnya dalam memenuhi undangan Presiden Hu Jintao yang disebutkan sebagai upaya pencarian sumber aliran dana pinjaman dan bantuan (Los Angeles Times, 2012). Dalam kunjungannya tersebut, Mesir membahas mengenai upaya penghentian kekerasan di Suriah dengan menarik keterlibatan negara yang juga merupakan rival Barat melalui pembentukan kelompok regional yang beranggotakan Mesir, Turki, Iran, dan Arab Saudi (New York Times, 2012). Amerika Serikat sendiri tidak senang dengan perluasan kerja sama perdagangan antara Mesir-China (Darwisheh, 2015).

Pendekatan juga dilakukan ke Iran yang merupakan rival dari Arab Saudi dan Amerika Serikat di kawasan Teluk. Morsi melakukan kunjungan ke Tehran dalam rangka menghadiri pertemuan Non-Align Movement sebagai langkah yang tak dilakukan kepala negara Mesir sejak Revolusi Iran 1979. Kunjungan balasan dilakukan oleh Presiden Iran ke Mesir pada tahun 2013 yang setelahnya membuka hubungan penerbangan komersial dalam tiga puluh tahun terakhir. Iran sendiri memandang peran Muslim Brotherhood di Mesir sebagai posisi yang menguntungkan dalam rivalitasnya dengan Arab Saudi yang disebutkan oleh Ali Khamenei, pemimpin tinggi agama Iran sebelumnya bahwa pemberontakan

terhadap Mubarak sebagai 'kebangkitan Islamis'. Kedekatan kembali hubungan kedua negara ini dalam posisi mengganggu dan berpotensi meninggikan tensi terkait isu nuklir Iran dan AS. (Darwisheh, 2015).

Tindakan lain dilakukan oleh Morsi dalam masa kepemimpinannya adalah membangun relasi dengan negara yang memiliki posisi rivalitas dengan sekutu AS dan posisi yang menguntungkan dalam isu-isu seperti Suriah. Melalui relasi dengan negara pro Muslim Brotherhood, Mesir memperoleh bantuan finansial dan dukungan terhadap posisi Muslim Brotherhood oleh Qatar dan Turki (Darwisheh, 2015).

2.4. Terjadinya Kudeta Terhadap Mohamed Morsi

Satu tahun masa kepemimpinan Morsi, gejolak politik kembali terjadi pada tahun 2013 di Mesir. Gejolak tersebut umumnya diserukan oleh sebagian kelompok-kelompok seperti kaum sekuler, liberal, Kristen Koptik, maupun kelompok anti-Islam agar Morsi turun dari jabatannya. Mereka menilai bahwa Morsi bertindak diskriminatif atas dominasi anggota Ikhwanul Muslimin dalam posisi jabatan di pemerintahan Mesir dan dinilai tidak memenuhi janji terkait reformasi dan perbaikan politik-ekonomi (Wa'ie, 2013). Dalam beberapa hal dalam tuntutan kaum oposisi, Morsi telah memberikan solusi misalnya penawaran jabatan terkait kepada oposisi (kelompok sekuler dan liberal), namun demikian tawaran tersebut ditolak. Morsi juga berupaya meningkatkan kondisi ekonomi Mesir dalam kebijakannya misalnya keberhasilan peningkatan produktivitas gandum Mesir menjadi 60% dari yang sebelumnya hanya 20%. Pada kondisi gejolak politik tersebut, sebelum dilakukan kudeta, pihak militer Mesir telah

memberi peringatan kepada Morsi agar menyelesaikan krisis internal pemerintahan Mesir atau meninggalkan posisinya dalam waktu 48 jam. Namun demikian Morsi menyatakan upaya kudeta yang akan dilakukan militer adalah sesuatu yang tidak sah dan legitimasi kepemimpinan dirinya merupakan sesuatu yang sah melalui jalur demokrasi (Kompas, 2013).

Pada 1 Juli 2013, terjadi penyerangan oleh oposisi Morsi ke markas Ikhwanul Muslimin berupa pelemparan jendela dan penjarahan gedung, dan pencurian barang serta dokumen. Kementerian Kesehatan dan Penduduk Mesir menyatakan dalam penyerangan tersebut 8 orang tewas akibat bentrokan (Kompas, 2013). Pada 3 Juli 2013, Kementerian Kesehatan dan Penduduk Mesir kembali menyatakan bahwa 16 orang pendukung Morsi tewas dalam unjuk rasa yang terjadi di tempat lain (Dawn, 2013). Akibat berbagai gejolak tersebut, krisis konstitusi dan politik terjadi di Mesir, di sisi lain Morsi menolak tuntutan pihak militer untuk meninggalkan jabatannya sebagai presiden.

Angkatan militer Mesir mulai mengancam akan mengambil alih Mesir jika politisi Mesir tidak dapat mengendalikan gejolak politik yang terjadi. Pada tanggal 3 Juli 2013, pihak militer Mesir menyatakan bahwa kepemimpinan Mohamed Morsi telah berakhir serta menyatakan bahwa konstitusi Mesir ditangguhkan, pemilu presiden baru akan dilaksanakan segera, serta pimpinan Mahkamah Konstitusi yaitu Adly Mansour akan diangkat menjadi kepala pemerintahan dan bersamaan dengan hal tersebut pemerintah transisi akan dibentuk hingga pemilu dilaksanakan (Wedeman, Sayah, & Smith, 2013). Berikut merupakan kronologi lengsernya Morsi:

Tabel 2.2. Kronologi Lengsernya Morsi

No.	Tanggal	Peristiwa
1.	11 Februari 2011	Lengsernya rezim Hosni Mubarak yang berkuasa selama 30 tahun
2.	28 November 2011	Penyelenggaraan tahap pertama Pemilu Mesir yang pertama kali sejak revolusi. Mayoritas partai Islam memenangkan dua pertiga kursi parlemen dan Ikhwanul Muslimin memenangkan setengahnya dari jumlah tersebut
3.	30 Juni 2012	Morsi memenangkan Pemilu dengan memperoleh suara sebesar 51,7%
4.	12 Agustus 2012	Morsi menghapus konstitusi mengenai penyerahan kekuasaan besar kepada militer dan memberhentikan Marsekal Hussein Tantawi yang merupakan panglima militer pada masa Hosni Mubarak
5.	22 November 2012	Morsi menerbitkan dekrit terkait kekuasaan baru untuk dirinya sendiri dan melarang penentang atas peraturan dan keputusannya
6.	27 November 2012	Massa memenuhi lapangan Tahrir Square dan menentang dekrit Morsi. Parlemen menerima konstitusi baru yang berisi penerapan hukum Islam dan memicu demonstrasi anti pemerintah
7.	4 Desember 2012	Bentrokan antara massa anti pemerintah dan pendukung Morsi. Gelombang demonstrasi meluas seluruh Mesir
8.	8 Desember 2012	Morsi mencabut dekrit terkait kekuasaan dirinya
9.	15 dan 22 Desember 2012	Referendum dilakukan dalam dua putaran dimana 64% pemilih mendukung konstitusi baru. Namun oposisi menyatakan terdapat kecurangan
10.	25 Desember 2012	Hasil referendum menghasilkan konstitusi baru Mesir disetujui dua pertiga anggota parlemen
11.	24 Januari 2013	Bentrokan antara demonstran dan polisi pada peringatan 1 Tahun Revolusi 2011. Korban tewas mencapai hampir 60 orang
12.	30 Juni 2013	Demonstrasi besar-besaran bertujuan menggulingkan Morsi pada masa satu tahun kekuasaannya

No.	Tanggal	Peristiwa
13.	1 Juli 2013	Oposisi memperingatkan Morsi dalam 1 hari untuk turun dari jabatannya atau menghadapi pemberontakan sipil. Pihak militer juga memberi peringatan untuk menyelesaikan gejolak atau militer akan melakukan intervensi dalam 48 jam
14.	2 Juli 2013	Demonstrasi pro-Morsi terjadi di Kairo dan sejumlah pria bersenjata membunuh 16 orang dan melukai 200 orang
15.	3 Juli 2013	Pihak militer menyatakan kekuasaan Morsi telah berakhir dan konstitusi ditangguhkan

Sumber: Kompas, 4 Juni 2013, Kronologi Kejatuhan Muhammada Mursi.
(internasional.kompas.com/read/2013/07/04/1104085/Kronologi.Kejatuhan.Muhammad.Mursi)

Pada saat upaya kudeta dilakukan di Mesir, Obama menyerukan agar militer Mesir untuk mengembalikan kekuasaan kembali kepada pemerintahan yang dipilih secara demokratis sesegera mungkin melalui proses yang transparan dan inklusif untuk menghindari penangkapan terhadap Morsi dan pendukungnya (Roberts, 2013). Namun dalam pernyataan lain dalam menanggapi demonstrasi di Mesir, Obama menyatakan bahwa meskipun Presiden Morsi terpilih secara demokratis, masih banyak pekerjaan yang dilakukan untuk menciptakan kehidupan demokrasi di Mesir (Roberts, 2013). Dalam sebuah pernyataan, White House tidak menggunakan istilah kudeta dan lebih memilih istilah ‘konsekuensi yang signifikan’ (BBC, 2013).